



UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Pasang surut gerakan perempuan Indonesia

Wieringa, S.

Publication date

2010

Document Version

Final published version

Published in

Perempuan dalam relasi agama dan negara

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

Wieringa, S. (2010). Pasang surut gerakan perempuan Indonesia. In *Perempuan dalam relasi agama dan negara* (pp. 26-35). Komnas Perempuan.

<http://www.komnasperempuan.or.id/publikasi/Indonesia/buku%20komnas%20perempuan/buku%20PAN%20edit.pdf>

General rights

It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations

If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: <https://uba.uva.nl/en/contact>, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

Pasang Surut Gerakan Perempuan Indonesia

- Judul : Kuntulanak Wangi; Organisasi-organisasi Perempuan Sesudah Tahun 1950
[*The Perfumed Nightmare*]
- Penulis : Saskia Wieringa
- Kategori : Discourse Attitude
- Jenis : Survey Riset Opini
 Berita Wawancara
- Media : Majalah/Buletin Elektronik Buku
 Koran Jurnal
- Tanggal-Vol : 1998
- Kolasi : iv, 46 hlm, 30 cm
- Penerbit : Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan Kalyanamitra
- ISBN/ISSN : Belum ada Nomor ISBN

Saskia Wieringa memperoleh gelar Ph.D di Universitas Amsterdam. Fokus utama kajiannya adalah isu-isu perencanaan gender, pemberdayaan perempuan, dan organisasi-organisasi perempuan. Dia juga *co-founder* Jaringan Kartini Asia Women's Studies. Beberapa karyanya antara lain *Sexual Politics in Indonesia (2002)*, *Wanita Desires (1999)*, dan *Lesbian Laki-laki dan Leluhur Isteri (2005)*.

Kuntulanak Wangi adalah penamaan yang cukup menggelitik. Nama ini disematkan Saskia Wieringa dalam menyuguhkan potret sejarah gerakan perempuan sejak tahun 1950 hingga paruh abad 20. Gerakan perempuan dalam rentang ini diulas secara detail dengan buku yang berjudul *Kuntulanak Wangi; Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia sesudah 1950*. Penelitian Saskia ini mengambil rentang sejarah paska tahun 1950, tepat bersamaan dengan gerakan perempuan di dunia internasional yang mulai bangkit. Ironisnya, pada era itu, gerakan perempuan di Indonesia justru mengalami dinamika sebaliknya. Bagaimana naskah *Kuntulanak Wangi* ini menguak babakan sejarah gerakan perempuan di Indonesia? Mari kita kuliti bersama penelitian Saskia Wieringa ini.

Intuisi Saskia di dorong oleh pertanyaan: Bagaimana mungkin dalam suatu periode tertentu, gerakan perempuan di Indonesia mengalami kemerosotan, padahal di belahan dunia lain, gerakan perempuan sedang berkembang dengan cukup baik? Mengapa komunitas internasional saat itu memposisikan organisasi perempuan Indonesia sebagai organisasi yang paling reaksioner? Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut Saskia, terjawab dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia dalam rentang tahun

antara tahun 1950 hingga 1965. Dalam rentang ini berjajar cerita tentang gerakan organisasi-organisasi perempuan (*sosialis*) yang kuat yang membela ide-ide feminisme, dan berada sebarisan dengan organisasi-organisasi perempuan progresif lainnya.

Dari asumsi dasar ini, Saskia melihat ada satu basis teoritis mengenai rumusan pertanyaan yang menjadi fokus kajian pada bagian pertama, seperti: Bagaimana pola dan format pembentukan identitas kebangsaan Indonesia? Sejauhmana perempuan ikut berperan dalam membentuk identitas kebangsaan tersebut? Sejauhmana isu perempuan diperbincangkan pada era pembentukan identitas bangsa tersebut?

Saskia Wieringa memulai pelacakan ilmiahnya dengan mengungkap sejarah ringkas Indonesia sebagai pengantar untuk sejarah gerakan perempuan Indonesia. Dia juga menelusuri gerakan ini sejak masa pendudukan Jepang, masa perjuangan kemerdekaan nasional, Orde Lama, kudeta kekuasaan militer tahun 1965 hingga masa pemerintahan Orde Baru. Naskah ini juga menyinggung sejumlah persoalan seperti hubungan antara kebebasan kaum perempuan dengan kemerdekaan nasional, peranan negara dan golongan kiri, serta pembangunan peribuan secara sosial dan politik.

RA. Kartini: Cikal Gerakan Perempuan

Saskia Wieringa, seperti halnya pendapat yang lazim memahami bahwa RA. Kartini adalah tokoh yang memprakarsai gerakan perempuan di Indonesia. Berbagai literatur yang menjadi rujukan Saskia juga menyebut bahwa RA. Kartini merupakan tokoh, pejuang dan perempuan feminis pada zamannya.

Sepanjang akhir abad ke-19 dan menjelang abad ke-20 muncul banyak *epos* perjuangan perempuan yang terinspirasi oleh jejak perjuangan Kartini. Sejauh yang kita ketahui, perhatian utama mereka adalah perjuangan bersenjata melawan Belanda bersama sang suami. Cut Nyak Dien dan Cut Meutia adalah tokoh perempuan di Aceh. Di Jawa, Roro Gusik membantu suaminya, Untung Surapati, mengangkat senjata. Di Maluku, Martha Tiahahu membantu Pattimura memberontak. Dan di Sulawesi Selatan, Emmy Saellan giat dalam perlawanan bersama Wolter Monginsidi.

Organisasi Perempuan dan Identitas Kebangsaan

Dalam perbincangan selanjutnya, Saskia mengajak kita melihat pertumbuhan dan perkembangan organisasi-organisasi perempuan dengan segenap kontribusinya dalam memperjuangkan kesetaraan atas keterpurukan, keterbelengguan tradisi, ekonomi, dan pendidikan kaum perempuan, dan bahkan ikut berjuang mengangkat senjata melawan penjajah.

Dalam rentang waktu ini, Saskia mencermati unsur lain gerakan perempuan yang begitu berhasrat mewujudkan “emansipasi nasional.” Buahnya, pada tahun 1912, berdiri *Poetri Mardika*, organisasi perempuan pertama yang menurut Saskia masih

bertalian kuat dengan organisasi Boedi Oetomo (1908). Meski dalam konteks ide dan gagasan, sejatinya Kartini telah lebih dulu menanamkan benih-benih nasionalisme.

Setelah *Poetri Mardika* berdiri, Majalah-majalah perempuan terbit di mana-mana yang berisi hujatan dan ketidaksetujuan terhadap perkawinan anak-anak serta praktik permaduan. Di samping itu, bermunculan perkumpulan-perkumpulan perempuan dengan nama-nama *Poetri Sejati* dan *Wanita Oetomo*.

Paska tahun 1920, dalam skala yang lebih luas, kaum perempuan mulai mengorganisasikan diri menurut garis agama. *Aisiyah*, seksi perempuan dalam gerakan pembaharuan Islam Muhammadiyah terbentuk pada tahun 1917. Diikuti kemudian organisasi perempuan Katolik dan Protestan. Di luar Jawa pun bermunculan organisasi-organisasi serupa semisal kaum perempuan di Maluku, Minahasa, dan Minangkabau.

Mendukung Gerakan Nasional

Menurut Saskia Wieringa, dalam banyak hal, sejarah gerakan perempuan Indonesia tidak terlepas dari gerakan nasional. Setiap partai dan organisasi nasional dari yang berhaluan Nasionalis, Islam hingga Kiri membangun organ sayap perempuannya sendiri. Misalnya, *Sarekat Rakyat*. Saskia mengamati bahwa organisasi ini di era 1930-an cukup masif mengorganisir demonstrasi-demonstrasi politik buruh perempuan, menuntut peningkatan upah, dan lain-lain. Salah satu di antara aksinya yang fenomenal pada tahun 1926 di Semarang menuntut perbaikan kondisi kerja buruh perempuan.

Pada tahun 1926, terjadi pemberontakan komunis, banyak perempuan ditahan, bukan sekadar karena membantu suami, tetapi juga disebabkan kegiatan mereka sendiri. Bersama dengan kaum laki-laki, mereka dibuang ke Boven Digul; sebuah kamp konsentrasi Belanda yang terletak di Irian Jaya, Papua sekarang. Di antara mereka, ada tokoh perempuan dari Jawa Barat (Sukaesih) dan Jawa Tengah (Munasiah).

Kongres Perempuan Indonesia Nasional pertama diselenggarakan di Yogyakarta pada bulan Desember tahun 1928. Hampir tiga puluh organisasi perempuan hadir pada kongres ini. Mosi mengenai reformasi perkawinan dan pendidikan diterima. Akan tetapi, lagi-lagi ketegangan timbul antara organisasi-organisasi perempuan Islam yang menentang *co-edukasi* [lelaki dan perempuan bersekolah bersama-sama dalam satu kelas] dan penghapusan poligini (poligami) dengan organisasi-organisasi perempuan nasional dan Kristen.

Hasil dari kongres pertama dibentuklah *Persatoean Perempoean Indonesia* (PPI), yang merupakan federasi organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Pada tahun berikutnya, nama federasi ini diubah menjadi *Perikatan Perhimpoean Isteri Indonesia* (PPII). PPII menerbitkan majalah sendiri yang bergerak di bidang pendidikan serta membentuk panitia penghapusan perdagangan perempuan dan anak-anak. Satu-satunya organisasi perempuan yang tidak hadir pada sidang-sidang nasional organisasi-organisasi perempuan yang tergabung dalam PPII ialah *Isteri Sedar* yang didirikan tahun 1930.

Isteri Sedar begitu radikal pada zaman itu. Mereka tidak mau berkompromi mengenai masalah-masalah poligini (poligami) dan perceraian yang menimbulkan perbedaan mendalam di antara organisasi-organisasi perempuan Islam dan lain-lainnya.

Kongres Perempuan Nasional berikutnya diadakan di Jakarta (1935), Bandung (1938), dan Semarang (1941), dan terlihat perjuangan nasional berangsur-angsur semakin menonjol. Dalam kongres tahun 1935, terbentuklah Kongres Perempuan Indonesia (KPI), dan dengan demikian PPII secara otomatis dibubarkan. Perhatian tertentu ditujukan kepada kaum perempuan dan golongan miskin, tetapi keanggotaan masih berasal dari lapisan atas dan tuntutan yang disuarakan pun sebagian besar masih diarahkan pada kepentingan kaum perempuan golongan atas.

Walaupun sejak 1930, gerakan nasional berkembang pesat, dan terlihat pula tanda-tanda tumbuhnya nasionalisme di dalam gerakan perempuan, namun sampai awal pendudukan Jepang tahun 1942, selain kaum perempuan *Serikat Rakyat*, *Isteri Sedar* adalah satu-satunya organisasi yang secara terbuka dan sistematis mengancam politik pemerintah kolonial Belanda dan memberi perhatian pada perjuangan Anti-Kapitalisme. Dalam rangka menyelesaikan masalah reformasi perkawinan yang pelik itu, pada tahun 1939, dibentuk sebuah badan yang bertugas meneliti hak-hak perempuan dalam perkawinan, baik menurut adat, hukum Islam (*fiqih*), maupun hukum Eropa. Namun, sebelum badan ini berhasil membuahkan sesuatu dalam rangka pembuatan kompromi antara golongan Islam dan bukan Islam, pada 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang.

Saskia kemudian menceritakan bahwa semasa pendudukan Jepang, semua kebijakan berubah: semua organisasi perempuan Indonesia dilarang, kecuali organisasi perempuan *Fujinkai* milik Jepang. Kegiatan *Fujinkai* seperti pemberantasan buta huruf dan berbagai pekerjaan sosial. Mereka yang aktif di dalam adalah para isteri pegawai negeri sipil. Sementara itu, gerakan nasional, termasuk beberapa organisasi perempuan antara lain Gerakan Wanita Sosialis (GWS) sebagian bergerak di bawah tanah. Banyak kaum nasionalis, termasuk yang perempuan ditangkap dan dibunuh.

Paska kekalahan Jepang, Saskia Wieringa mencatat mulai ada tuntutan untuk memberikan jaminan hukum dan hak politik yang sama bagi perempuan. Dan hasilnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang baru lahir tahun 1945, kaum perempuan dijamin hak-hak hukum dan politiknya sama seperti kaum laki-laki.

Selanjutnya, kaum perempuan pun menyelenggarakan Kongres Perempuan Nasional pada Desember tahun 1945 di Klaten dan kongres berikutnya di Solo tahun 1946. Kongres Wanita Indonesia dibentuk sebagai suatu federasi dari semua organisasi perempuan yang menyokong kemerdekaan bangsa Indonesia. Dapur umum dibentuk oleh berbagai organisasi perempuan dan kaum perempuan memainkan peranan penting dalam membangun jalur komunikasi antara berbagai satuan gerilya. Banyak perempuan yang bahkan memanggul senjata. Sementara itu, kaum perempuan menyuarakan tuntutan mereka: upah yang sama dan hak yang sama atas kerja, perbaikan hukum perkawinan, pendidikan untuk kaum perempuan, dan lain-lain.

Sesudah tahun 1950, persatuan gerakan perempuan Indonesia yang telah dibangun pada hari-hari perjuangan nasional dulu berangsur-angsur hancur. Tatkala memasuki masa Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 1955, berbagai partai politik membentuk sayap organisasi perempuan masing-masing. Ketegangan antara sayap perempuan Islam dan nasionalis timbul. Berkembang bermacam-macam kegiatan; balai-balai perempuan dan bank-bank perempuan, bahkan surau perempuan didirikan. Kala itu, bermunculan berbagai macam organisasi dan majalah perempuan, tetapi hampir semua kegiatan ini semakin terikat pada partai politik laki-laki, gerakan keagamaan (laki-laki), ataupun pada organisasi pejabat laki-laki. Pada sebagian besar organisasi ini, pandangan elitis tetap bertahan walaupun pendudukan Jepang dan perjuangan pembebasan nasional telah agak mengaburkan tajamnya garis pemisah antara golongan kaya dan miskin dalam masyarakat Indonesia.

Gerwani dan Organisasi Perempuan Lain

Sejak akhir dasawarsa 1950-an, dua organisasi perempuan kiri mulai memperoleh kedudukan penting: Secara genealogis, Gerwani berasal dari Gerakan Wanita Isteri Sedar (Gerwis) yang didirikan tahun 1950 dengan anggota hanya 500 orang perempuan. Para anggota ini pada umumnya berpendidikan tinggi dan berkesadaran politik. Dari segi ideologi, organisasi ini merupakan kelanjutan dari organisasi *Isteri Sedar*. Kaum perempuan dalam Gerwis umumnya dari generasi yang lebih muda, tetapi mereka punya hubungan dengan perempuan yang bergabung dalam *Isteri Sedar*.

Sementara itu, sekitar tahun 1961, anggota organisasi Gerwani mencapai lebih dari satu juta orang. Warung-warung koperasi dan koperasi simpan-pinjam kecil-kecilan didirikan. Perempuan tani dan buruh disokong dalam sengketa mereka dengan tuan tanah atau majikan pabrik tempat mereka bekerja. Taman kanak-kanak diselenggarakan di pasar-pasar, perkebunan-perkebunan, kampung-kampung. Kaum perempuan dididik untuk menjadi guru pada sekolah-sekolah ini. Dibuka pula badan-badan penyuluh perkawinan untuk membantu kaum perempuan yang menghadapi masalah perkawinan. Kursus-kursus kader dibuka pada berbagai tingkat organisasi dan dalam kursus-kursus ini digunakan buku-buku tulisan Friedrich Engels, August Bebel, Clara Zetkin, dan Soekarno. Pada kesempatan ini juga diajarkan keterampilan teknis misalnya tata buku dan manajemen. Hal penting lain yang diajarkan adalah sejarah gerakan perempuan Indonesia.

Gerwani menerbitkan dua majalah, *Api Kartini* dan *Berita Gerwani*. *Api Kartini* ditujukan bagi pembaca lapisan tengah yang sedang tumbuh dan memuat tulisan-tulisan tentang masak-memasak, pengasuhan anak, mode, dan lain-lain, tetapi juga soal-soal yang lebih feminis dan kiri, seperti kebutuhan akan taman kanak-kanak, kejahatan imperialisme. Di sinilah, Saskia mencatat *Api Kartini* sebagai majalah pertama di Indonesia yang menunjukkan pengaruh buruk film-film Amerika yang bermutu rendah yang saat itu banyak beredar.

Kemudian, *Berita Gerwani* adalah majalah internal organisasi, dengan berita-berita tentang kegiatan organisasi, seperti konferensi, laporan kunjungan ke organisasi-organisasi perempuan di negeri-negeri sosialis, dan lain-lain. Apabila *Api Kartini* terutama terbit untuk menarik perempuan golongan tengah, dan meyakinkan mereka bahwa Gerwani pun memberikan perhatian pada masalah-masalah tradisional perempuan, *Berita Gerwani* yang lebih radikal bermaksud memberikan dukungan kepada kader-kader daerah dan membantu mereka dalam menghadapi tugas-tugas mereka.

Menurut penelitian Saskia, Gerwani adalah organisasi perempuan yang paling pesat perkembangannya, saat itu. Sekaligus juga paling berpengaruh dan paling kontroversial. Ketika itu organisasi-organisasi perempuan yang lain juga sangat aktif sehingga bisa dikatakan bahwa gerakan perempuan sedang berkembang.

Seperti disebutkan di atas, hubungan Gerwani dengan golongan perempuan Islam agak mengalami kerenggangan. Demikian halnya, hubungan dengan organisasi perempuan nasionalis yang terbesar, Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari). Persoalan dengan Perwari ini agaknya bisa dibagi menjadi dua masalah pokok. *Pertama*, ada perbedaan yang sangat besar dalam hal keanggotaan. Sebagian besar anggota Perwari berasal dari kalangan borjuasi, terutama isteri-isteri intelektual dan birokrat yang merupakan inti pengikut Presiden Soekarno. Banyak intelektual perempuan yang menjadi anggota, tetapi pada umumnya organisasi ini agak bersuasana borjuasi-tradisional Barat. Sedang anggota Gerwani lebih banyak berasal dari perempuan miskin dari lapisan menengah bawah dan kelas buruh, walaupun seperti sudah disebutkan di atas melalui *Api Kartini* mereka berusaha menarik lebih banyak kaum perempuan borjuis.

Kedua, Perwari, khususnya pada diri ketuanya, Sujatin Kartowijono, mengambil sikap keras mengenai masalah poligini (poligami), juga pada saat perkawinan Presiden Soekarno yang kedua tahun 1954. Gerwani sebegitu jauh tidak terlalu keras menentang Presiden Soekarno. Untuk keberaniannya itu Perwari harus membayar mahal; banyak fasilitas yang dulu diperolehnya menjadi hilang.

Sungguh berat tugas KWI (Kongres Wanita Indonesia), yang saat itu menjadi badan koordinasi bagi semua organisasi perempuan, untuk menggabungkan kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan tersebut. Pada tahun 1958, anggota-anggota Gerwani mendorong kerjasama yang lebih erat antara berbagai golongan kiri yang ada dalam KWI dengan maksud agar KWI menjadi lebih peka dan aktif dalam masalah-masalah yang relevan bagi kaum perempuan miskin.

Langkah selanjutnya, sebagaimana dikutip dalam buku Saskia dibentuk *Gerakan Massa* di dalam KWI. Golongan kiri, termasuk sejumlah organisasi perempuan Islam, berusaha mendorong KWI memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret dengan menegaskan hubungan antara emansipasi perempuan dengan gerakan sosialisme. Beberapa orang pengurus KWI yang lain seperti Maria Ulfah dengan

sengit menentang usaha yang disebutnya infiltrasi Gerwani ini, dan *Gerakan Massa* pun dibubarkan. Tetapi KWI tidak bisa menghindar berada sekereta dengan golongan kiri. Pada kongresnya tahun 1961, wewenang eksekutif sekretariat diperluas dan diputuskan bahwa KWI adalah alat revolusi sesuai dengan semboyan pada masa itu. Maka kegiatan-kegiatan demi kaum perempuan miskin lebih banyak diselenggarakan.

Perkembangan ini mengakibatkan timbulnya polarisasi di dalam organisasi. Golongan kanan, terutama golongan Islam, menolak gerakan kiri ini. Pada tahun 1962, KWI menjadi anggota Front Nasional yang membolehkan anggota-anggotanya, terutama dari Gerwani, untuk mengikuti latihan sukarelawan untuk perjuangan nasional yang lebih besar, yaitu pembebasan Irian Barat dan menentang pembentukan Federasi Malaysia. Pada kongres tahun 1964, namanya yang lama, Kowani digunakan lagi, dan Nyonya Subandrio, seorang tokoh perempuan nasionalis kiri, menjadi ketuanya. Kowani terus bergeser ke kiri dan tanggal 8 Maret 1965 dirayakan sebagai peristiwa nasional. Perebutan kekuasaan Oktober 1965 mengakhiri proses ini.

Kudeta Militer, GERWANI terlibat?

Mengenai peristiwa Gerakan 30 September 1965, dimana sejumlah perwira menengah Angkatan Darat menculik dan membunuh enam orang jenderal, tampaknya Saskia Wieringa mempunyai perspektif yang lain.

Menurut penemuan Saskia pemuda-pemudi dari golongan nasionalis juga mendapatkan latihan yang sama dan menurut rencana pada tanggal 1 Oktober kemudian juga menjadi giliran latihan pemuda-pemudi Muslim. Akan tetapi, sesudah mayat para jenderal yang terbunuh ditemukan, Angkatan Darat menyebar cerita keji tentang upacara pembunuhan jenderal-jenderal itu oleh perempuan-perempuan muda komunis yang “mendapatkan latihan khusus.”

Pencitraan dan *image* negatif yang menyudutkan kelompok Gerwani merupakan kombinasi propaganda media dan Angkatan Darat, yang menurut Saskia satu-satunya kampanye fitnah yang paling berhasil dalam sejarah dunia modern.

Dalam catatan Saskia, pada akhir Oktober tahun 1965, Gerwani secara resmi dikeluarkan dari Kowani. Meski dalam kenyataan benar-benar sulit untuk menghapus pengaruh Gerwani yang kuat dalam diri Kowani. Terbukti, pengaruh kiri ketua Kowani Nyonya Subandrio, isteri tokoh nasionalis kiri masih terlihat dari diadakannya peringatan Hari Perempuan Internasional yang diperingati tanggal 8 Maret hingga menginjak tahun 1966.

Saskia juga menuliskan catatan penting di mana pada tahun 1966, Gerwani secara resmi dinyatakan terlarang. Dalam proses pembentukan pemerintah Orde Baru Soeharto, Kowani dan semua organisasi perempuan yang lain harus “menyesuaikan diri.” Secara berangsur-angsur, hampir semua program sosial dan ekonomi mereka yang mengabdikan kepentingan perempuan miskin dan perempuan desa harus dihapuskan.

Babak Orde Baru

Menurut Saskia, untuk menggeser kepemimpinan Orde Lama Soekarno, Soeharto mengerahkan dukungan massa dengan mengadakan rapat-rapat umum pemuda, pelajar, dan juga kaum perempuan yang kontra dan anti terhadap Gerwani seperti Kawi (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia).

Dalam tahun-tahun pertama paska kudeta (1966), tulis Saskia, organisasi-organisasi perempuan telah dibersihkan dari “unsur-unsur kiri.” Misalnya, Perwari, yang pada tahun-tahun terakhir menjelang kudeta menghadapi banyak kesulitan, menarik sejumlah isteri pejabat tinggi tokoh nasional kiri dari kedudukannya sebagai anggota pengurus agar (dipaksa) keluar atau mengundurkan diri dari organisasi. Demikian juga berangsur-angsur Perwari harus meninggalkan kegiatannya yang berhubungan dengan kepentingan kaum perempuan miskin.

Catatan penting dari perjalanan gerakan perempuan di era Orde Baru kira-kira di wilayah ini adalah bahwa selama dua puluh tahun terakhir (dalam catatan Saskia, terutama saat penelitiannya), organisasi-organisasi yang semula menyambut Orde Baru pun menjadi kecewa. Peran dan gerakan organisasi-organisasi Islam, misalnya sedikit demi sedikit, namun secara pasti, memperoleh tekanan politik dari pemerintah. Mereka boleh menyelenggarakan pertemuan-pertemuan pengajian, dan boleh menjalankan kegiatan amal untuk perempuan miskin. Tetapi mereka tidak boleh mengungkapkan hal-hal yang tidak adil yang terjadi di masa pemerintah Orde Baru.

Pada tahun 1978, Perwari pun dipaksa untuk bergabung secara resmi pada partai pemerintah (Golkar). Perilaku ini menjadi tanda bagaimana organisasi perempuan yang menyimpang dari garis-garis yang telah dijabarkan oleh Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, Departemen Sosial atau Departemen Dalam Negeri, niscaya menghadapi risiko besar. Sampai di sini, bisa dikatakan organisasi-organisasi perempuan yang “independen” telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka.

Pemerintah kemudian menciptakan organisasi-organisasi perempuan yang baru dengan mengelompokkan berbagai organisasi perempuan, misalnya: Dharma Wanita (bagi isteri pegawai negeri sipil) dan Dharma Pertiwi (bagi isteri yang suaminya bekerja di salah satu cabang angkatan bersenjata). Satu organisasi lagi adalah untuk program kesejahteraan keluarga, yaitu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).

PKK telah berdiri sejak tahun 1957, sebagai program pendidikan untuk kesejahteraan keluarga. Dalam pertengahan dasawarsa 1960-an, isteri Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ibu Munadi memelopori pelaksanaan PKK sebagai bagian dari usaha pembangunan daerah. Sekarang ini, saat dimana Saskia melakukan penelitian ini, PKK terbentuk di seluruh Indonesia. Kegiatannya diperluas sehingga mencakup semua program pemerintah yang ditetapkan untuk kaum perempuan. Tanggung-jawab mengenai program-program PKK ada di tangan Menteri Dalam Negeri. Isteri Menteri Dalam Negeri secara resmi menjadi Ketua PKK, sedang suaminya menjadi “penasehat.” Program ini dikoordinasikan melalui, Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita.

Prakteknya, kegiatan anggota PKK adalah membuat karangan bunga, jahit-menjahit, masak-memasak, mengikuti penataran-penataran indoktrinasi ideologi negara, dan siap membantu pemerintah setiap saat pemerintah memerlukannya. Di sinilah mulai ditanamkan bahwa PKK tidak perlu banyak melakukan kegiatan yang revolusioner, seperti halnya dilakukan oleh Gerwani dan lainnya pada paruh awal abad ini. Bahwa berbicara tentang penindasan perempuan berikut kritik dan segala macam pertanyaan kritis politis berarti mempertanyakan politik pemerintah, dan ini, tulis Saskia, adalah perbuatan tabu yang menyebabkan orang dituduh berbuat *subversif*.

Organisasi Isteri Pegawai

Pola kepemimpinan Soeharto dengan gaya otoriternya mengubah segalanya, termasuk mengubah tatanan keorganisasian perempuan yang telah ada semenjak orde lama, yaitu akhir dasawarsa 1950-an. Dimana organisasi perempuan saat itu tidak mewajibkan setiap perempuan atau isteri pegawai dan angkatan bersenjata menjadi anggota di dalamnya. Struktur ini diubah oleh pemerintah Orde Baru. Berangsur-angsur diputuskan bahwa isteri para pejabat harus menjadi anggota organisasi ini. Keanggotaannya menjadi wajib, iuran dipotong otomatis dari gaji suami. Perempuan-perempuan pegawai pemerintah harus masuk KORPRI (korps pegawai negeri republik indonesia), organisasi untuk pegawai negeri, dan jika mereka menikah dengan seorang pegawai kantor pemerintah, mereka harus masuk organisasi perempuan pada kantor sang suami. Perubahan terakhir diberlakukan dalam pertengahan dasawarsa tahun 1970-an, pimpinan tidak lagi berdasar pemilihan, tetapi organisasi harus mengikuti pola hirarki yang sama dengan hirarki pemerintahan: isteri kepala kantor dengan sendirinya menjadi ketua organisasi Dharma Wanita di kantor bersangkutan. Dengan demikian, jika suami pindah atau naik pangkat, maka isteri pun mengikutinya, masuk dalam organisasi isteri di kantor baru sang suami. Jika sang suami pensiun, isteri juga harus mundur, tanpa peduli ia masih muda, cakap, dan suka bekerja.

Sementara itu, di tingkat daerah, Saskia mencontohkan keorganisasian yang berada di Surakarta. Bagaimana organisasi perempuan dihimpun bersama di dalam suatu organisasi semacam GOWS (Gabungan Organisasi Wanita Surakarta). Seperti halnya Kowani pada tingkat pusat, organisasi-organisasi yang bergabung di dalam Gows dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu Satu golongan terdiri atas kelompok organisasi isteri, dan yang lain adalah kelompok organisasi keagamaan atau organisasi lama yang umumnya nasionalis.

Organisasi isteri itu masih terbagi lagi menjadi dua, Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi. Pada akhir dasawarsa 1970-an, sekitar empat puluh organisasi perempuan bergabung dalam Gows. Gows mendapat pengawasan ketat dari pemegang kekuasaan tertinggi di Solo, juga dengan perantaraan para isetri. Badan pelindung Gows terdiri atas isteri walikota, isteri kepala kejaksaan, isteri ketua pengadilan negeri, isteri komandan militer, dan isteri kepala polisi. Para suami mereka adalah anggota semacam badan pemerintahan untuk kota Solo, yang dibentuk sesudah walikota lama yang berhaluan

kiri dipecat setelah kudeta 1965. Anggota salah satu organisasi yang tergabung dalam Gows itu umumnya berasal dari lapisan menengah atau lapisan atas masyarakat. Sebutan umum yang biasanya ditujukan untuk kaum perempuan dari kalangan ini ialah “Kuntulanak Wangi.” Mereka pergi kesana-kemari naik becak atau mobil mengenakan busana yang paling bagus, giat menjajakan politik pemerintah sekarang.

Sampai di sini bisa di ambil benang merah bahwa gerakan perempuan Indonesia paska lahirnya Orde Baru dan kudeta 1965, pelan tapi pasti mengalami tekanan politik yang luar biasa dari rezim Soeharto. Kondisi demikian menurut Saskia berbanding terbalik dengan negara-negara dunia ketiga yang lain, seperti India, Karibia, Meksiko, dan Peru, dimana gerakan perempuan begitu mencolok kegiatannya. Di rentang waktu kehadiran rezim Soeharto menjadi titik balik, dimana kritisisme dan gerakan kiri diberangus kehadirannya. Jangan coba-coba menampilkan keluh kesah akibat situasi sosial ekonomi yang sulit, karena niscaya akan dicap sebagai berpolitik. Berpolitik di era ini, bagi rezim sama saja dengan menyuguhkan nuansa kiri, dimana kehadiran kiri menjadi area terlarang bagi Orde Baru. []